

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI & KERANGKA  
BERPIKIR**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun skripsi dan jurnalnya sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Metode	Hasil
1.	Yuliana, Ipik Permana dan Moh. Taufik Hidayat. 2022. "Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus pada Kampung Keluarga Berkualitas Kunir Sejahtera di Desa Kedaungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon)". Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7, No. 3.	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.	Hasil Penelitian: menunjukkan bahwa program kampung keluarga berkualitas Kunir Sejahtera di Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan pedoman pengelolaan kampung keluarga berencana, ada beberapa indikator kurang terlaksananya kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas dengan baik. Hasil evaluasi berdasarkan kebijakan William N. Dunn dengan

			<p>menggunakan 6 indikator yaitu : 1).efektivitas, 2).efisiensi, 3).kecukupan, 4).perataan, 5).responsivitas, 6).ketepatan</p> <p>menunjukkan program kampung keluarga berkualitas belum optimal. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian tujuan yaitu antara lain:</p> <p>1).sosialisasi dan pembinaan dari dinas terkait, 2). pemanfaatan potensi yang ada di sekitar kampung keluarga berkualitas, 3).monitoring dan evaluasi program dilakukan untuk mengetahui perkembangan pengelolaan kampung, 4).peran aktif dari tenaga lini lapangan dalam perumusan program, 5).melakukan komunikasi</p>
--	--	--	--

			secara aktif dengan semua elemen masyarakat agar dapat secara terbuka menyampaikan informasi secara jelas dan terperinci, 6).pembinaan dari dinas terkait tentang peningkatan ketrampilan dan juga pemahaman tentang program kampung keluarga berkualitas.
<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan Yuliana, Ipik Permana dan Moh. Taufik Hidayat memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memperoleh data tentang implementasi program kampung keluarga berkualitas dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan program kampung keluarga berkualitas. Penelitian ini lebih fokus tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori berdasarkan kebijakan William N. Dunn. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih fokus untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan dan kendala dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di kampung keluarga berkualitas Kelurahan Ciputat dengan menggunakan teori yang berbeda yang penelitian sebelumnya.</p>			
2.	Muhamad Alfarezi Saputra , Mayarni. 2022. “Implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Mekar Wangi di Kelurahan Tangkerang Barat.”	Metode riset yang digunakan adalah riset kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.	Hasil Penelitian: Riset ini menghasilkan temuan bila Kampung KB Mekar Wangsi telah melaksanakan beberapa program utama yakni adanya bank sampah,

		<p>meningkatkan ekonomi melalui kerajinan tangan, dari aspek kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan lansia dan melakukan olah raga rutin. Hambatan dalam riset ini adalah Coronavirus disease 2019, partisipasi masyarakat, sumber daya pengkaderan, dan anggaran.</p>
<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan Muhamad Alfarezi Saputra dan Mayarni memiliki tujuan bagaimana pelaksanaan dan tantangan program kampung keluarga berkualitas Mekar Wangi di Kelurahan Tangkerang Barat dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan keluarga berkualitas selaku menjembatani kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk direalisasikan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini Kampung keluarga berkualitas Mekar Wangi di Kelurahan Tangkerang Barat telah melaksanakan beberapa program dan hambatan dalam riset ini ada corana virus disease 2019, partisipasi masyarakat, sumber daya pengkaderan dan anggaran. Penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih fokus untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan dan kendala dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di kampung keluarga berkualitas Kelurahan Ciputat dengan menggunakan teori yang berbeda yang penelitian sebelumnya dan waktu penelitian yang dilakukan setelah pandemic corana virus disease 2019.</p>		

3.	Asnania dan Munawar Shodiq. 2022. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kampung Berkualitas Pada Masa Pandemi Covid-19." Jurnal Bestari Vol. 2 No. 2,	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan Kampung KB di Kelurahan Way Lunik telah terinternalisasi dengan baik, partisipasi masyarakat sangat baik dengan sukarela merintis dan terlibat dalam kegiatan Kampung KB sampai saat ini. Namun kendala pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan keterbatasan pada pelaksanaan kegiatan. Kegiatan koordinasi dan sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan sosial media. Berdasarkan tahapan partisipasi public Arnstein maka partisipasi masyarakat Kelurahan Way Lunik dalam mengelola Kampung KB berada pada level 6 yaitu</p>
----	---	--	--

			partnership (bekerjasama).
<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan Asnania dan Munawar Shodiq bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kampung keluarga berkualitas di Kelurahan Way Lunik sebelum dan pada masa pandemic covid-19. Penelitian ini lebih berfokus kepada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kampung keluarga berkualitas pada masa pandemic covid-19. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan tantangan maupun hambatan yang di miliki kampung keluarga berkualitas Kelurahan Ciputat.</p>			
4.	<p>Azra Alfia Fitri dan Adianto. 2022. “Profesionalisme Penyuluh Dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kb) di Kota Pekanbaru.” Jurnal Ilmiah, November 2022, 8 (22), 49-59</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.</p>	<p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa pelaksanaan penyuluhan program KB oleh penyuluh di masa pandemi Covid-19 sudah maksimal. informasi karena penggunaan teknologi ini merupakan salah satu media penghubung dalam memberikan informasi, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu penyuluh perlu ditingkatkan secara kuantitas dan masih rendahnya partisipasi</p>

			masyarakat dalam melaksanakan KB (program KB).
<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan Azra Alfia Fitri dan Adianto lebih berfokus tentang profesionalisme penyuluh dalam implementasi program kampung keluarga berkualitas di Kota Pekanbaru dan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul manajemen sumber daya manusia. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan tantangan maupun hambatan yang di miliki kampung keluarga berkualitas Kelurahan Ciputat.</p>			
5.	<p>I Wayan Sentanu Juliarta, 2022. “Efektivitas Implementasi Kebijakan Kampung KB dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rejasa”</p>	<p>Analisis penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan teknik purposive sampling menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pencatatan dokumen.</p>	<p>Hasil Penelitian :          Hasil penelitian Program KKBPK yang dicanangkan di Desa Rejasa seluruhnya telah terlaksana dengan baik, indikator pengembangan program kependudukan dan KB, dan pengembangan program pembangunan keluarga di kampung KB. Sekitar 80% masyarakat Desa Rejasa menyatakan bahwa Program KKBPK yang dicanangkan telah terlaksana dengan baik. Efektivitas program KKBPK secara umum</p>

			<p>dapat dikategorikan efektif, namun dua dari delapan indikator masih dinyatakan belum efektif, yaitu indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan indikator sosial ekonomi. Faktor- faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan KKBPK di Kampung KB Desa Rejasa adalah komitmen dan komunikasi. Masyarakat disarankan supaya dapat lebih memahami kesetaraan gender, meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak, mampu meningkatkan kualitas hidup dengan membangun wirausaha, serta lebih aktif dalam mencari informasi mengenai program kampung KB, baik dari mulut ke mulut maupun media sosial/internet.</p>
--	--	--	--

			<p>Bagi Petugas KB diharapkan mampu memberikan sosialisasi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , dan mampu lebih membuka wawasan masyarakat dalam memulai wirausaha, berkomitmen pada setiap program agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta lebih aktif melakukan komunikasi kepada seluruh masyarakat. Bagi Pemerintah khususnya Kecamatan Penebel agar lebih memahami program dalam Kampung KB supaya dapat memberikan dukungan kepada petugas KB dalam mencapai tujuan dari Kampung KB, pendampingan dalam setiap melaksanakan program serta memberikan dukungan</p>
--	--	--	---

			berupa permodalan bagi masyarakat.
<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan I Wayan bertujuan untuk menganalisis program Kampung KB, menganalisis efektivitas Implementasi Kebijakan Kampung KB , serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kampung KB di Kampung KB Desa Rejasa. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan tantangan maupun hambatan yang di miliki kampung keluarga berkualitas Kelurahan Ciputat.</p>			
6.	<p>Tesalonika Syela Maleke, Masjie Pangkey, &amp; Deysi Tampongangoy. 2022. “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan</p>	<p>Analisis penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan teknik purposive sampling menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pencatatan dokumen.</p>	<p>Hasil Penelitian :          Hasil penelitian yang ada, menunjukkan bahwa Efektivitas Program Kampung KB di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dapat dikatakan sudah efektif. Akan tetapi, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Program Kampung KB ini yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dari beberapa masyarakat yang masih kurang sehingga</p>

			mengakibatkan pemahaman yang salah terhadap Program Kampung KB, proses sosialisasi yang belum matang dalam persiapan maupun pelaksanaannya, dan masih ada sarana dan prasarana yang harus ditambah.
<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan Tesalonika Syela Maleke, dkk. Bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas program kampung keluarga berkualitas di Desa Temboan Kecamatan Minahasa Selatan. Penelitian ini juga mengukuhkan teori dari Richard M. Steers mengenai ukuran efektivitas dan indikator-indikator yang mempengaruhi efektivitas. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan tantangan maupun hambatan yang di miliki kampung keluarga berkualitas Kelurahan Ciputat dan menggunakan teori kebijakan Van Metter dan Van Horn.</p>			
7.	Qadar Drajat. 2022. “Efektivitas Program Kampung KB dalam Membentuk Keluarga yang Berkualitas (Studi Kasus Kampung KB Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)”	Menggunakan Penelitian Kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi	Hasil Penelitian : Pertama, Progam kampung KB dalam membentuk keluarga yang berkualitas dan sejatera, sudah memberikan hal positif, melihat dari 3 (tiga) progam unggulan seperti progam pengendalian penduduk, progam pelayanan KB,

		<p>progam pembangunan keluarga juga dengan BKR, BKL, serta UUPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), telah memperlihatkan efek baik di kesejateraan semua KK di Kampung KB Desa Parijatah Wetan; Kedua, Dusun Melik Parijatah Wetan telah dilakukan penyuluhan problematika penanaman tumbuhtumbuhan dapat menolong keuangan masyarakat. Sebuah faktor dapat disebut sejahtera, kalau kebersihan lingkungannya terawat, dapat menciptakan keluarga lebih bahagia serta membuat kondisi yang baik di masyarakat. Warga serta petugas Kampung KB Desa Parijatah Wetan , mengungkapkan jika progam kampung KB</p>
--	--	---

		<p>memungkinkan untuk yang direncanakan disetiap kampung. Ketiga Efektivitas penerapan digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Sehingga untuk menentukan efektif tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran-ukuran efektivitas studi kasus di Desa Parijatah Wetan dapat dibilang efektif, karena memang program Kampung KB menentukan keberhasilan program dan pencapaian tujuan yang diharapkan program Kampung KB Desa Parijatah Wetan.</p>
<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan Qadar Drajat bertujuan untuk memahami program yang dilaksanakan Kampung KB di Desa Parijatah Wetan, untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kampung KB di Desa Parijatah Wetan dan untuk mengetahui efektivitas program Kampung KB. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan tantangan maupun hambatan yang di miliki kampung</p>		

keluarga berkualitas Kelurahan Ciputat dan menggunakan teori kebijakan Van Metter dan Van Horn.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi sering dikaitnya dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati.

Menurut Kamus Webster dalam (Abdul Wahab, 1997) merumuskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan), *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Perumusan secara singkat terkait pengertian implementasi tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Sedangkan menurut (Hamalik, 2007) Implementasi adalah suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan suatu dampak, baik dampak pengetahuan, keterampilan, maupun nilai serta sikap.

Menurut Syauckani dkk (Sawito, 2014) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Menurut Syukur (Surmayadi, 2005) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
2. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program atau kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam implementasi atau pelaksanaan harus ada yang bertanggung jawab dan mengawasi selama proses kebijakan berlangsung.

Kebijakan sosial yang merupakan salah satu bentuk kebijakan public memiliki definisi yang berarti ketetapan pemerintah yang dibuat dan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada dalam suatu sistem semisal negara. Permasalahan tersebut dibuat lantaran penemuan ataupun hasil analisis yang ada ditengah masyarakat. Kebijakan sosial juga dapat berarti ketetapan yang dibuat secara bersamaan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan sosial (fungsi preventif), mengatasi permasalahan sosial (fungsi kuratif), dan langkah memperluaskan konsep kesejahteraan (stake obligation) dalam memenuhi hak-hak masyarakat sebagai makhluk sosial (Suharto, 2020).

Lanjut seperti apa yang kemukakan oleh Bessant, Watts, dan Smith

(2006 ); *In short, social policy refers to what government do when they attempt to improve the quality of people"s live by providing a range of income support, community service and support programs.* Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan sosial merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat peraturan-peraturan atau ketetapan yang nantinya diharapkan aturan tersebut dapat diterapkan untuk mengakomodir kehidupan masyarakat yang lebih baik yang dapat berbentuk pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosial lainnya (Suharto, 2020).

Secara garis besar, kebijakan sosial di implementasikan dalam tiga kategori yang didalamnya merupakan perundang-undangan, program-program yang menjadi Langkah pelayanan sosial, dan sistem fiskal (Midgley). Berdasarkan kategori tersebut dapat dikatakan bahwa setiap perundang-undangan yang berbentuk peraturan daerah yang menyangkut permasalahan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial, walaupun pada dasarnya jika berbicara tentang kebijakan-kebijakan sosial tidak melulu berbentuk perundang-undangan (Suharto, 2020).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Dalam penelitian ini digunakan model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn. Keberhasilan implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu :

1. Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur. Jika ukuran dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan terlalu ideal, maka kebijakan tersebut akan sulit untuk direalisasikan (Agustino, 2016).

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa :

“Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut”.

## 2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tiga sumber daya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam penentuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik dituntut dalam setiap tahap implementasi. Sumber daya finansial menentukan keterlaksanaannya suatu kebijakan. Jika sumber daya finansial bermasalah maka implementasi kebijakan akan terganggu atau bahkan terhambat. Donald Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa: ”Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan terbatasnya dana atau insentif lain dalam

implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

Jika kita urut satu persatu terkait rumusan para ahli tentang makna dan hakikat implementasi bagi sebuah program tentu makalah ini akan menjadi begitu panjang, maka dalam kesempatan ini dapat kita tegaskan bahwa Implementasi merupakan instrumen yang begitu penting bagi pemerintah sebagai implementator dalam mencapai tujuan –tujuan dan kesepakatan program yang telah di sepakati atau yang telah dirumuskan.. Dengan kata lain berhasil atau tidak berhasilnya sebuah program tergantung dari seberapa sukses program tersebut dapat di implementasikan dan seberapa besar pula efek yang didapat dari implementasi program tersebut.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Penentuan agen pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh cangkupan atau luas wilayah kebijakan.

### 4. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016) ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya *bersifat top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak

mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”. Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diawali dengan *befiltered* (penyaringan) lebih dahulu dari persepsi para pelaksana (*implementors*) dan dalam batas mana kebijakan itu akan dilaksanakan. Ada tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain yaitu : 1) Pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, 2) arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan 3), intensitas terhadap kebijakan.

#### 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering

merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

#### 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Terakhir, perlu diperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Keikut campuran lingkungan eksternal dalam faktor juga mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan itu. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif agar implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah melihat sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan.

Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, perlu adanya upaya untuk membuat kondisi lingkungan eksternal menjadi kondusif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar.

Digunakannya teori implementasi kebijakan publik dari Van Metter dan Van Horn karena terdapat enam variabel tersebut di atas yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, kebijakan yaitu program Kampung KB bersifat nasional yang berasal dari pemerintah pusat (*top down*) dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Implementasi program Kampung KB akan berhasil apabila ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) KB. OPD KB merupakan pelaksana dari kebijakan program Kampung KB dimana partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Selain itu faktor pendukung lainnya adalah finansial/dana berupa anggaran yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pengembangan program Kampung KB dilakukan secara bertahap sejak tahun 2016 hingga saat ini. Hal ini menyangkut keberhasilan Kampung KB yang dapat diukur dari tahun ke tahun (sumberdaya waktu).

Menurut Merile S. Grindle dalam (Winarno, 2002) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Faktor isi kebijakan itu sendiri mencakup:

- a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan

- b) Jenis manfaat yang diterima oleh target group. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah Delman Asri lebih suka menerima program penyuluhan KB daripada menerima program senam bersama
  - c) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan dan,
  - d) Apakah letak sebuah program sudah tepat sasaran
- Sedangkan, faktor lingkungan implementasi mencakup:
- a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
  - b) Karakteristik institusi dan peraturan yang sedang berjalan
  - c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2002) juga menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

### **2.2.2 Kesejahteraan Keluarga**

#### **a. Definisi Kesejahteraan Keluarga**

Kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di

dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN, 2015).

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. (Badan Pusat Statistik. 2014).

Menurut Edi Suharto (2017) kesejahteraan memiliki beberapa makna yang relative berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsep, yaitu :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial
2. Intitusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Keluarga menjadi basis terpenting dalam perkembangan kehidupan manusia. Keluarga merupakan lingkungan hidup primer dan fundamental tempat terbentuknya kepribadian yang mewarnai kehidupan manusia. Persemaian nilai-nilai agama, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral secara praktis akan berproses dan ditentukan oleh keluarga. Keluarga merupakan pranata sosial pertama dan utama yang mengemban fungsi strategis dalam membekali nilai-nilai kehidupan bagi anak manusia yang tengah tumbuh dan berkembang untuk mencari makna dalam perjalanan hidupnya. (Sjafari, 2014)

Istilah keluarga dalam sosiologi menjadi salah satu bagian ikon yang mendapat perhatian khusus. Keluarga dianggap penting sebagai bagian dari masyarakat secara umum. Individu terbentuk karena adanya keluarga dan dari keluarga pada akhirnya akan membentuk masyarakat. ( Latif , 2007)

Keluarga merupakan satuan terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerja sama ekonomi. Keluarga adalah unit terkecil Yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, yang diikat oleh perkawinan yang sah baik dari segi agama, hukum, maupun pemerintahan.(Ismawati, 2012).

Menurut Abdul Latif (2007) pentingnya peran keluarga atau posisi keluarga dalam pembentukan masyarakat, maka perlu kiranya menjelaskan tentang fungsi keluarga : fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afektif, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomis.

Pengertian keluarga menurut Ki Hajar Dewantara, berasal dari kata “ kawula” yang berarti saya, abdi atau hamba, yang bertugas dan berkewajiban mengabdikan diri. Sedangkan Warga berarti anggota yang mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan kepentingan kelompoknya / keluarganya. Setiap anggota dalam keluarga memiliki kewajiban untuk saling menolong terhadap anggota keluarganya untuk mencapai tujuan keluarga (Kuswardinah, 2017).

Adapun pengertian secara umum mengenai arti keluarga yaitu sekelompok manusia yang hidup secara bersama – sama dalam satuan unit terkecil dari masyarakat dan umumnya mempunyai hubungan darah, ikatan perkawinan maupun ikatan lainnya, serta tinggal dalam satu rumah yang dipimpin oleh

kepala keluarga.

Kesejahteraan keluarga merupakan kondisi dimana suatu keluarga dapat hidup secara layak, baik dan tidak membebani orang lain dalam memenuhi aspek kehidupan sehari-hari. Keluarga yang sejahtera juga bisa di sosialisasikan dengan kondisi yang stabil dan baik, serta dapat menjalani kehidupan tanpa memikirkan kebutuhan hidup yang mendesak (Miharga, 2014).

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009)

Menurut (Soetjipto, 1992) kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota 34 keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Konsepsi tersebut mengandung arti bahwa, kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Adapun keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga

1) Faktor Internal

a) Jumlah Anggota Keluarga

Zaman sekarang tuntutan keluarga semakin

meningkat, tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan ini akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sedikit.

b) Tempat Tinggal

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Tempat tinggal yang diatur sesuai selera keindahan, bersih, aman akan menimbulkan suasana yang tenang. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur dan kotor tidak jarang akan menimbulkan suasana kebosanan. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram akibat tempat tinggal yang membuat kacaunya pikiran.

c) Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi daripada hubungan hubungan yang benar benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat menghormati, toleransi, bantu membantu dan saling mempercayai. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Semakin banyak sumber keuangan atau pendapatan yang diterima maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Adapun sumber keuangan/pendapatan dapat diperoleh dari menyewakan tanah, pekerjaan lain diluar berdagang,

dsb (BKKBN, 2015).

## 2) Faktor Eksternal

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan agar tidak terjadi kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga karena hal ini dapat mengganggu kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa atau ketentraman batin anggota keluarga yang datang dari luar lingkungan keluarga antara lain:

- a) Faktor Manusia Iri hati dan fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma
- b) Faktor Alam Bahaya alam, kerusuhan, dan berbagai macam virus penyakit.
- c) Faktor Ekonomi Negara Pendapatan tiap penduduk atau income perkapita rendah, inflasi. (BKKBN, 2015)

## c. Indikator Kesejahteraan Keluarga

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan bahwa terdapat indikator tingkat kesejahteraan keluarga yang mana dibagi kedalam 5 tahapan, yaitu sebagai berikut:

### 1) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.

### 2) Keluarga Sejahtera I

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, tetapi belum dapat

memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya (*Psychological needs*) seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca dan tulis latin.

3) Keluarga Sejahtera II

Keluarga-keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*), juga telah memenuhi seluruh kebutuhan psikologisnya (*psychological needs*), akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (*development needs*), seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

4) Keluarga Sejahtera III

Keluarga-keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), psikologis (*psychological needs*) dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi indikator aktualisasi diri (*self esteem*), seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial serta berperan aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.

5) Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga-keluarga yang telah mampu memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat dasar, psikologis maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Di dalam tahapan-tahapan tersebut, keluarga sejahtera dapat diklasifikasikan dengan indikator-indikator sebagai berikut, yaitu:

- a) Tahapan Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.
- b) Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “Kebutuhan Dasar Keluarga” (*basic needs*) dari total 22 indikator keluarga sejahtera, yaitu:
  1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.
  2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).
  3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal

keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan

4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).
5. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti Intra Uterine Device (IUD), Tubektomi (MOW), Vasektomi (MOP), Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu

terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.

c) Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator “Kebutuhan Psikologis” (*psychological needs*) keluarga, dari total 22 indikator keluarga sejahtera

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Maksudnya adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing- masing keluarga/ anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat-tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing- masing agama/kepercayaan.
2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. Maksudnya adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.
3. Seluruh anggota memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun. Maksudnya adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari-hari oleh masyarakat setempat.

4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah. Maksudnya adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m<sup>2</sup>
5. Tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. Maksudnya adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari.
6. Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Maksudnya adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari secara terus menerus.
7. Seluruh anggota keluarga umur 10 – 60 tahun bisa baca tulisan latin. Maksudnya adalah anggota keluarga yang berumur 10 – 60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat-kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku

bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.

8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. Maksudnya adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan 32 menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.
- d) Lima indikator Keluarga Sejahtera (KS III) atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*), dari total 22 indikator keluarga sejahtera
1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Maksudnya adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing-masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak-anak, sekolah madrasah bagi anak-anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak-anak yang beragama Kristen.
  2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. Maksudnya adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-
  3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Maksudnya adalah kebiasaan

seluruh anggota keluarga untuk makan bersama-sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.

4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Maksudnya adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.
  5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/televisi. Maksudnya adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, buletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama
- e) Dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) dari total 22 indikator keluarga sejahtera

1. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosia Maksudnya adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi 34 kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan- kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya dalam hal Ini tidak termasuk sumbangan wajib).
2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat Maksudnya adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olahraga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Mediasi Desa (LMD) dan sebagainya)

d. Fungsi Keluarga

Keluarga dengan segala permasalahannya adalah suatu asset dan potensi yang perlu dibina dan dimantapkan peranannya. Keluarga perlu memiliki kualitas kesejahteraan dan ketahanan fisik maupun non fisik yang seimbang dalam

menghadapi perubahan dan tuntutan masa depan. Melalui pemberdayaan keluarga diharapkan dapat dibina manusia yang tumbuh selaras, serasi dan seimbang secara lahiriah dan mental guna mewujudkan keluarga berkualitas. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi delapan. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, yaitu:

1. Fungsi Agama
2. Fungsi Sosial Budaya
3. Fungsi Cinta Kasih
4. Fungsi Perlindungan
5. Fungsi Reproduksi
6. Fungsi Pendidikan
7. Fungsi Ekonomi
8. Fungsi Lingkungan

a) Konsep Dasar 8 Fungsi Keluarga

1. Fungsi Agama

Agama adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anak yang lahir. Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama. Sebagai orang tua yang menjadi guru dalam pendidikan anaknya, orang tua juga berperan sebagai guru yang menanamkan nilai-nilai agama seperti nilai iman, taqwa, kejujuran, tanggung rasa, rajin, kesalehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, sabar,

ikhlas dan kasih sayang dalam membentuk kepercayaan kepada seorang anak.

Melaksanakan fungsi agama tidak boleh mengabaikan toleransi beragama karena keluarga Indonesia menganut kepercayaan dan agama yang beragam. Keluarga diharapkan mampu berfungsi sebagai pendorong bagi seluruh anggotanya agar menjadi insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peningkatan dari segi pengamalan dan ketaqwaan yang menuntun manusia dalam kehidupan beragama baik di dunia maupun di akhirat.

## 2. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi keluarga yang mana dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Dimana keluarga memiliki kepedulian dalam melestarikan budaya nasional yang luhur dan bermartabat. Orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan pola tingkah laku yang berhubungan dengan orang lain dalam memberikan warisan budaya. seperti toleransi, saling menghargai, gotong royong, kerukunan, kebersamaan, peduli dan cinta tanah air. Keberadaan keluarga diharapkan mampu berfungsi untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan kekayaan sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Budaya adalah nilai, norma, keyakinan dan perilaku yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi penerusnya.

## 3. Fungsi Cinta Kasih

Pada hakekatnya keluarga diharapkan mampu berfungsi untuk mewujudkan proses pengembangan timbal balik rasa cinta dan kasih sayang antara setiap anggota keluarga, antar kerabat serta antar generasi yang merupakan dasar terciptanya keluarga yang harmonis. Terjalannya hubungan emosional antara suami-isteri, orang tua dan anak, anak dengan anak yang diliputi oleh saling pengertian, saling menghargai dan saling tolong menolong. Cinta dan kasih sayang merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter anak. Fungsi cinta kasih memiliki makna bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fungsi cinta kasih dalam keluarga dimana pertumbuhan seorang anak tidak lepas dari pengaruh keluarganya. Peran dalam membentuk kepribadian seorang anak melalui bentuk cinta dan kasih sayang baik kepada dirinya sendiri maupun anggota keluarganya seperti empati, adil, pemaaf, suka menolong, pengorbanan dan tanggung jawab. Fungsi cinta kasih dalam keluarga menjadi landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan isteri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

#### 4. Fungsi Perlindungan

Keluarga adalah tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggotanya. Dan tempat untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. Adanya

suasan saling melindungi maka keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan menentramkan semua anggota keluarganya. Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya memberikan kebenaran dan keteladanan kepada anak-anaknya. Seperti aman dan peduli. Melindungi setiap anggotanya dari tindakan yang kurang baik akan memberikan rasa nyaman dan terlindung dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

Fungsi perlindungan adalah menciptakan perasaan aman dan terlindungi dari segala macam ancaman atau gangguan bagi keluarga baik yang datang dari luar maupun dari dalam keluarga. Keluarga dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan yang memberikan rasa aman tenteram lahir batin sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia.

#### 5. Fungsi Reproduksi

Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk meneruskan keturunannya, sehingga dapat berlangsungnya hidupnya sesuai dengan fungsi biologinya secara sehat dan terencana, sehingga anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas Dalam fungsi reproduksi, keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluarga menjadi tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, dan pendidikan seksualitas bagi anak. Keluarga juga menjadi tempat memberikan informasi

kepada anggotanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan keluarga.

#### 6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga sebagai tempat utama dan pertama memberikan pendidikan kepada semua anak untuk bekal masa depan. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga meliputi pendidikan untuk mencerdaskan dan membentuk karakter anak. Fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki makna juga bahwa keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat. Interaksi yang sangat intensif dalam keluarga maka proses pendidikan berjalan dengan sangat efektif. Keluarga mensosialisasikan kepada anaknya tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan buruk maupun yang salah dan yang benar. Fungsi pendidikan dalam keluarga memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat melanjutkan kehidupan di masa mendatang. Sehingga dapat mengantarkan anak menjadi panutan masyarakat dan bagi dirinya sendiri.

#### 7. Fungsi Ekonomi

Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga. Dimana keluarga menjadi sarana yang baik untuk bertugas memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, misalnya ayah sebagai pencari uang untuk kebutuhan dan ibu bertugas mengurus anak. Keluarga sebagai tempat untuk

memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materinya serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya. Keluarga adalah sebagai tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sebagai tempat untuk memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya.

#### 8. Fungsi Lingkungan

Keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan lingkungan mikro, meso, dan makro. Keluarga berperan untuk membina lingkungan masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Sikap peduli keluarga terhadap lingkungan untuk memberikan yang terbaik bagi generasi yang akan datang.

Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara selaras, seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis. Keluarga berperan untuk membina lingkungan bermasyarakat dan lingkungan alam sekitar. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam.

### **2.2.3 Kampung Keluarga Berkualitas**

Definisi Kampung KB Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program KKBPK serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.

Kampung KB Kampung KB dicanangkan oleh Bapak Presiden RI (Ir.Joko Widodo) pada bulan januari 2016, bahwa Kampung KB ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah sampai kepada masyarakat kalangan elit, dan bahkan tulisan-tulisan mengenai kampung KB banyak mengisi kolom-kolom pemberitaan di media massa (surat kabar, majalah, tabloid) dan bahkan menjadi pemberitaan yang cukup hangat dan populer di media-media elektronik. Kampung KB ini dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Lantas kenapa kampung KB ini dibentuk, ada beberapa hal yang melatar belakanginya, yaitu :

- 1) Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru,
- 2) Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas
- 3) Penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat
- 4) Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia"
- 5) Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.

Tujuan Kampung KB Menurut pedoman pengelolaan Kampung KB (2017) tujuan pembentukan Kampung KB secara umum dan khusus, yaitu:

1) Tujuan Umum

Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

2) Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus, tujuan dibentuknya Kampung KB ini selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program

KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Syarat-syarat Pembentukan Kampung KB Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu :

1) Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat.

Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan disuatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

2) Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah.

Dukungan dan komitmen yang dimaksud adalah dukungan, komitmen dan peran aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan Implementasi Kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang instansi masing- masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3) Partisipasi Aktif Masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat yang dimaksud adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :

- 1) Kriteria utama: yang mencakup dua hal, yaitu: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada, (2) Jumlah peserta KB di bawah rata-rata

pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.

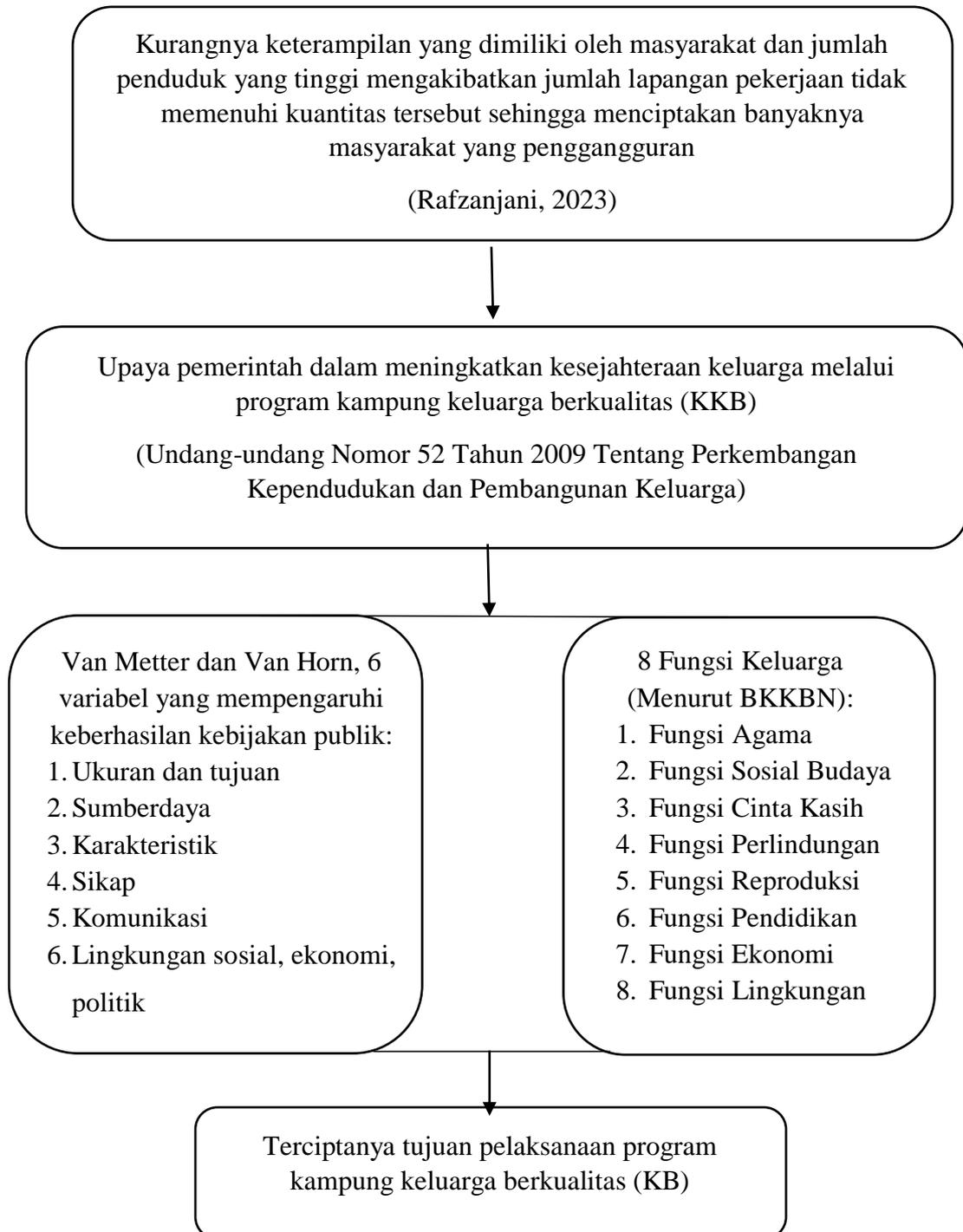
- 2) Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah, yaitu: (1) Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, (10) Padat Penduduk. Selanjutnya dalam menentukan kriteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh kriteria yang ada.
- 3) Kriteria Khusus: yang mencakup 5 hal, yaitu: (1) kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga, (2) kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah, (3) kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan, (4) kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah, (5) kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. Pasangan usia subur (PUS), lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksanaannya

adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

Dari uraian program KB, dapat disimpulkan bahwa hakikat Kampung KB adalah yaitu untuk membumikan dan Menggelorakan kembali Program KB, mendekatkan pelayanan KKBPK kepada keluarga, memantapkan 8 fungsi Keluarga dalam aplikasi kehidupan, mengintegrasikan program pembangunan lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada keluarga, membangun rasa memiliki Keluarga dan masyarakat terhadap program KKBPK; dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

### 2.3 Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1** Kerangka Berpikir

Suriasumantri, 1986 (dalam Sugiono, 2007) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis, kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, diperlukan sebuah kerangka konsep atau model penelitian.

Meningkatnya jumlah penduduk atau dinamika kuantitasnya yang tidak dapat terkontrol dapat mempengaruhi kualitas hidup terhadap fungsi pembangunan nasional, sustainability penduduk maju atau smart people dan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2004 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan 8 fungsi keluarga meliputi fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan. Maka dari itu pemerintah membentuk program Kampung Keluarga Berkualitas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan Van Metter dan Van Horn, terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan public, yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial ekonomi dan politik.